

Reformasi PBB Suatu Utopia?

DALAM peringatan 60 Tahun KAA belum lama ini Presiden Joko Widodo menyerukan agar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera direformasi. Isu reformasi badan dunia yang terbesar itu memang kian mencuat ke permukaan akibat perubahan politik global. Namun, mengapa PBB masih sulit untuk direformasi?

Sampai saat ini jumlah anggota PBB telah membengkak menjadi 193 negara, namun fungsi yang dijalankan bisa dikatakan lemah. Sebab, PBB di bawah bayang-bayang kekuasaan negara-negara besar yang mempunyai hak veto yang sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan (DK). Wewenang Dewan Keamanan relatif lebih besar dibanding dengan Majelis Umum, sehingga ini merupakan kelemahan struktural PBB.

Sewaktu muncul kritik untuk memperjuangkan perbaikan kelembagaan di PBB agar lebih demokratis, yang pertama kali diarahkan adalah perubahan komposisi di Dewan Keamanan, yakni menambah jumlah anggota tetap Dewan Keamanan itu. Usul tersebut memang dipertimbangkan, tetapi karena masalahnya dinilai sangat rumit, maka sampai sekarang belum pernah ada perubahan, sehingga kekuasaan PBB dikendalikan oleh anggota tetap Dewan Keamanan.

Sesungguhnya reformasi PBB bukan sekadar penambahan atau perubahan anggota Dewan Keamanan, pengurangan staf administrasi dan penekanan pengeluaran dana, tetapi lebih luas dari itu. Namun, yang terjadi sampai saat ini belum ada persepsi yang sama tentang pemahaman terhadap reformasi itu sendiri. Akibatnya, apabila upaya reformasi itu menyangkut kepentingan suatu negara terutama negara pendana yang besar, usaha tersebut akan gagal. Misalnya masalah peninjauan kembali hak veto, pasti akan diveto oleh anggota tetap DK PBB.

Bertolak dari kondisi PBB saat ini, maka badan dunia itu memang perlu mereformasi diri agar tidak diperalat oleh para anggotanya yang kuat. Sebab perlu diyakini betapa pun kecil peran PBB bagi perdamaian dunia, namun masih berarti daripada tidak sama sekali.

A Kardiyat Wiharyanto

Sebenarnya pembahasan mengenai reformasi DK PBB telah dimulai sejak tahun 1992. Dewan belum direstrukturisasi sejak 1963 ketika keanggotaannya diperluas dari 11 menjadi 15. Banyak negara anggota percaya bahwa 15 kursi saat ini (5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap), sudah tidak lagi menggambarkan keseimbangan kekuatan di dunia.

Terkait dengan reformasi keanggotaan Dewan Keamanan, salah satu perubahan yang diusulkan adalah untuk menambah jumlah anggota. Pada tanggal 31 Maret 2005, mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyerukan kepada PBB untuk mencapai konsensus pada perluasan dewan untuk 24 anggota. Yaitu dengan menambah 6 anggota tetap baru dan 3 anggota tidak tetap baru, atau menambah 8 anggota baru dalam klasifikasi keanggotaan yang baru. Namun usul tersebut ibarat suara di padang gurun.

Bukan rahasia lagi bahwa kekompakan di Dewan Keamanan sampai saat ini masih sulit dicapai. Badan dunia itu terkesan tak lagi responsif pada kejadian yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Kondisi seperti itu jelas akan mendorong negara besar tergoda mengambil langkah sendiri merespons sebuah kasus karena PBB yang tak segera bisa bertindak.

Meskipun demikian, dengan segala kelemahan, kekurangan dan kegagalannya, dunia dewasa ini tidak dapat membayangkan situasi global tanpa PBB. Artinya, kita melihat bahwa PBB masih tetap diperlukan di masa-masa mendatang, paling tidak sebagai forum untuk bertemu dan berkonsultasi dari berbagai bangsa dari penjuru dunia yang mempunyai perbedaan latar belakang dalam ras, agama, bahasa, budaya maupun tingkat pengetahuannya.

Di samping itu, PBB diakui mampu menangguhkan Perang Dunia III yang disertai dengan ancaman nuklirnya yang maha dahsyat. Meski di berbagai negara terjadi konflik yang berkesudahan, namun selama ini PBB masih bisa menjaga perdamaian dunia serta mencatat senjata di beberapa daerah konflik.

Perlu pula disadari bahwa untuk mereformasi Dewan Keamanan akan membutuhkan upaya besar karena memerlukan perubahan dalam Piagam dan bukan hanya penerimaan oleh dua pertiga dari Majelis, tetapi juga persetujuan dari semua lima anggota tetap. Meskipun pertemuan informal mengenai hal itu sudah digelar, tetapi belum ada kemajuan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa reformasi PBB masih merupakan sebuah utopia. Namun demikian, reformasi harus terus diusahakan agar badan dunia itu mampu menciptakan perdamaian setempat sepanjang terjadi di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika saat ini. □ - g

*) *Drs A Kardiyat Wiharyanto*
Dosen Universitas Sa
Dharma Yogyakarta